



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARMANSAH
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT
3. NHK : 84140

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 6616 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/700 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 6.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.551.000.000

III. HUTANG

Rp. 263.597.393

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.287.402.607

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.